

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Pengelolaan Kelas Berbasis Gender di MAS Darul Ulum Banda Aceh

Mardin¹, Muhammad Fachry Kamal²

mardin@ar-raniry.ac.id, fachrykamal23@gmail.com

^{1&2} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Correspondence Address: mardin@ar-raniry.ac.id

Abstract

This research aims to address the issue of the leadership of madrasah heads in gender-based classroom management. This study seeks to examine how gender-based class planning, implementation, and evaluation are carried out. The methods employed were qualitative methods, with data collection techniques derived from observations, unstructured interviews, documentation reviews, and triangulation. The findings indicate that gender-based classroom planning has only implemented 3 out of the 9 planned stages quite well, which include classroom standards, teacher training, and the implementation of teaching strategies. The implementation of gender-based classes has been carried out in almost all activities, so there is no difference with gender-based classroom activities. Supervision has been carried out quite well, but it is not optimal because planning has not been programmed and implemented. The more programmed the gender-based classroom management policy, the better the management will be.

Keywords: *Leadership, Classroom Management, Gender-Based.*

Abstrak

Penelitian ini ingin menjawab permasalahan tentang kepemimpinan kepala madrasah dalam pengelolaan kelas berbasis gender. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kelas berbasis gender. Metode yang digunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya diperoleh dari hasil observasi, wawancara tidak berstruktur, telaah dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan kelas berbasis gender hanya tiga tahapan perencanaan yang sudah cukup baik dilaksanakan dari sembilan tahapan perencanaan diantaranya standar kelas, pelatihan guru, dan implementasi strategi pengajaran. Pelaksanaan kelas berbasis gender hampir seluruh kegiatan sudah dilaksanakan, sehingga tidak ada perbedaan dengan kegiatan kelas berbasis gender. Pengawasan sudah dilaksanakan cukup baik, akan tetapi kurang maksimal dikarenakan perencanaan belum terprogram dan

dilaksanakan. Semakin terprogram kebijakan pengelolaan kelas berbasis gender, semakin baik pula pengelolaannya.

Keywords: Kepemimpinan, Pengelolaan Kelas, Berbasis Gender

Introduction

Kepemimpinan kepala madrasah memiliki peran strategis dalam pengelolaan kelas berbasis gender. Pengelolaan kelas berbasis gender mengacu pada pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan gender dalam mendesain pengalaman belajar yang adil dan tidak diskriminatif. Kepemimpinan kepala madrasah berperan tidak hanya dalam memimpin pengelolaan tenaga pendidik, kurikulum dan fasilitas, tetapi juga dalam menegakkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di ruang kelas.

Hal ini mencakup penciptaan atmosfer yang memungkinkan peserta didik untuk berkembang tanpa dibatasi oleh stereotip atau peran tradisional yang sering kali dikaitkan dengan gender tertentu. Kepala madrasah yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan responsif terhadap isu gender dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mengurangi ketimpangan gender, serta meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran.

Pengelolaan kelas berbasis gender adalah pengaturan dan pengelompokan peserta didik pada setiap kelas dengan memisahkan antara peserta didik laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, nyaman, dan kondusif, serta bagaimana seorang guru dapat mengelola interaksi antar peserta didik dan guru (Zulaiha, 2017). Terjadi pemisahan dalam proses pembelajaran. Sejak dari proses belajar mengajar, praktik dan ujian. Selain itu juga terjadi pemisahan dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan interaksi sosial.

Tujuan pemisahan kelas berdasarkan gender pada masa penjajahan Belanda pada mulanya adalah untuk mengafiliasi kaum perempuan mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana halnya kaum laki-laki (Syarifurrahman, 2013). Di

saat itu nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat masih sangat kuat dan tertutup.

Namun setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, pembatasan memperoleh pendidikan sudah tidak ada lagi. Kesempatan memperoleh pendidikan baik laki-laki maupun perempuan terbuka sama. Kaum perempuan bebas masuk kemanapun yang disukai, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan militer. Pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran berbasis non genderpun mulai tumbuh. Umumnya berada di lembaga-lembaga pendidikan pemerintah.

Sejalan dengan itu, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu masif, fluktuasi dekadensi moral para peserta didik tidak terhindarkan. Semangat kembali ke khittah yang lalu mulai muncul. Disemangati oleh nilai-nilai keislaman yang kuat. Pembelajaran berbasis genderpun semakin populer terutama di kalangan lembaga-lembaga pendidikan agama seperti madrasah dan pesantren.

Di Aceh, pemisahan kelas berbasis gender banyak dilakukan di pesantren-pesantren. Bahkan dilakukan di sekolah-sekolah pemerintah. Apalagi Aceh adalah provinsi yang menerapkan syariah Islam. Hal ini sejalan dengan Qanun Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang berasas keislaman dan diselenggarakan dengan prinsip kesesuaian dengan kearifan lokal. Melalui pemisahan kelas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya maksiat dan membuat peserta didik lebih fokus dalam pembelajaran.

Saat ini, banyak lembaga pendidikan berbasis gender telah melakukan pengelolaan dengan baik. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ika Arifah tahun 2019 dengan judul "Upaya Pola Pengelolaan Kelas berbasis Gender dalam Meningkatkan Prestasi Hafalan Al-Quran (Studi Kasus Kelas VIII SMP IT Ar-Rahmah Bogor)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pola pengelolaan kelas berbasis gender di SMP IT Ar-Rahmah Bogor telah dilaksanakan dengan baik dan dapat

meningkatkan prestasi hafalan Al-Qur'an peserta didik (Arifah, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Zainan Abidin dan Asep Rohmatullah pada tahun 2023 dengan judul "Manajemen Kelas Berbasis Pemisahan Gender dan Relasinya dengan Prestasi Siswa Studi Kasus di MTs Darullughah Wadda'wah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kelas berbasis gender yang dilakukan di MTs Dalwa dikelola dengan baik. Akhlak dan prestasi belajar peserta didik memiliki tren positif (Rohmatullah, 2023).

Salah satu sekolah yang melakukan pengelolaan kelas berbasis gender di Aceh adalah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darul Ulum Banda Aceh. Di madrasah ini terdapat 12 kelas, 6 kelas laki-laki dan 6 kelas perempuan. Masing-masing kelas terdapat 2 rombongan belajar berbasis gender yang tiap kelas berisi 25-33 peserta didik.

Hasil observasi penulis di MAS Darul Ulum Banda Aceh mendapati bahwa kepemimpinan kepala madrasah dalam pengelolaan kelas berbasis gender belum dilakukan secara maksimal. Indikatornya dapat dilihat dari belum adanya regulasi tertulis di madrasah terkait kelas berbasis gender. Beberapa tahapan pengelolaan kelas berbasis gender meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev), umpan balik serta pelaporan belum maksimal dilakukan. Akibatnya, pengelolaan kelas berbasis gender tidak adil, inklusif, bias dan optimal. Karenanya, permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti secara ilmiah.

Kepemimpinan kepala madrasah dalam pengelolaan kelas merupakan kegiatan terkecil dalam usaha pendidikan. Kegiatan ini merupakan "dapur inti" dari seluruh jenis manajemen pendidikan. Meliputi pengelolaan kelas bersifat manajerial dan intruksional (Nugraha, 2018). Karenanya, dalam kajian ini, penulis membatasi hanya meneliti bidang manajerial. Bidang yang menjadi bagian tugas kepemimpinan kepala madrasah dalam pengelolaan kelas berbasis gender. Penulis tidak mengkaji

terkait kegiatan instruksional guru di dalam kelas.

Literatur Riveiw

Sejalan dengan diberlakukannya syariat Islam pada 1 Muharram 1423 H, pembagian kelas berbasis gender di Aceh menjadi trend tertentu. Pembagian kelas berbasis gender bukan hanya dilakukan di madrasah swasta, bahkan juga di madrasah negeri. Agar hasil pembelajaran dapat optimal, sangat dibutuhkan pengelolaan yang optimal pula.

Manajemen kelas adalah sebuah upaya memaksimalkan potensi kelas agar tercipta suasana yang kondusif bagi peserta didik untuk belajar dan guru pun merasa nyaman dalam mengajar (Oviyanti, 2009). Pengelolaan kelas berbasis gender merupakan suatu upaya pengaturan kelas dengan cara pengelompokan berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara peserta didik laki-laki dan perempuan di kelas secara terpisah agar tercipta suasana yang kondusif bagi peserta didik untuk belajar dan guru pun merasa nyaman dalam mengajar. Tujuannya agar implementasi syariat Islam di Aceh dapat berjalan melalui lembaga pendidikan. Namun tetap tidak mengesampingkan peningkatan mutu pembelajaran.

Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa banyak manfaat yang diperoleh dengan pengelompokan berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara peserta didik laki-laki dan perempuan di kelas secara terpisah. Penelitian yang dilakukan Leonard Sax, seorang psikolog dan Michael Gurian, penulis dan pendidik yang mengkaji perbedaan gender dalam konteks pendidikan. Keduanya sangat mendukung pembelajaran berbasis gender. Menurutnya, pembelajaran berbasis gender memudahkan guru melakukan pembelajaran sesuai dengan perbedaan gaya belajar laki-laki dan perempuan (Gurian, 2005; Sax, 2005).

Barbara E. Mc Keon, seorang pendidik dan peneliti yang mempelajari

dampak pembagian kelas berbasis gender, berkesimpulan bahwa pemisahan dapat membantu mengurangi stereotip gender dan meningkatkan partisipasi peserta didik (McKeon, 2010). Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Namun stereotip dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif (Choiri, 2018).

Agar proses pembelajaran berjalan secara optimal, diperlukan kepemimpinan kepala dalam pengelolaan pembelajaran berbasis gender yang optimal pula. Pengelolaan kelas berbasis gender merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan upaya bersama dari kepala madrasah, guru dan peserta didik. Melalui upaya bersama ini diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang adil, inklusif, dan mendukung bagi semua peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka (Nurmayuli & Oktarina, 2023).

Ada beberapa tahapan yang dilakukan kepala madrasah dalam pengelolaan kelas berbasis gender agar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Menurut Karwati dan Priansya, tahapan yang perlu dilakukan kepala madrasah dalam pengelolaan kelas berbasis gender agar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal adalah melakukan perencanaan kelas, pengorganisasian kelas, kepemimpinan kelas, dan pengendalian kelas (Priansya, 2014).

Menurut Amiruddin, tahapan yang harus dilakukan kepala madrasah dalam pengelolaan kelas berbasis gender meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Amiruddin, et all., 2022). Beberapa pakar lain,

menjelaskan selain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dilengkapi dengan evaluasi, umpan balik dan pelaporan (Nguyen, P., & Le, 2021; Rogers, K., & Allen, 2020).

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa tahapan yang perlu dilakukan kepala madrasah dalam pengelolaan kelas berbasis gender adalah melakukan perencanaan kelas, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring-evaluasi (monev), umpan balik dan pelaporan. Berikut akan diuraikan tahapan-tahapan tersebut dan indikator kerjanya.

Method

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus pada MAS Darul Ulum Banda Aceh. Studi kasus atau case study adalah penelitian yang fokus penyelidikannya mengkaji terkait dengan fenomena terkini dalam konteks kehidupan nyata. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah observasi, wawancara tidak berstruktur, dokumentasi dan triangulasi (Arifin, 2012; Yin, 2003).

Penelitian diawali dengan kegiatan observasi dan dilanjutkan dengan kegiatan wawancara. Wawancara dilakukan tidak terstruktur. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, guru dan peserta didik.

Analisis dokumen dilakukan sejak awal sampai akhir penelitian yang digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi. Analisis diawali dengan reduksi data yaitu memilih data pokok, tema dan pola, kemudian menyingkirkan data yang tidak digunakan. Dilanjutkan dengan penyajian data secara sistimatis agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Setelah disajikan, dilakukan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2014).

Responden yang diteliti berjumlah 6 responden yang terdiri dari kepala

madrasah 1 responden, wakil kepala bidang kurikulum 1 responden, guru 2 responden dan peserta didik 2 responden. Responden berusia 17 sampai 50 tahun. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling melalui pertimbangan tertentu agar hasil kajian diperoleh secara maksimal. Tujuannya untuk membantu peneliti mendapatkan peserta kajian yang paling baik, sesuai dengan masalah yang diteliti dan memiliki banyak informasi.

Results and Discussion

1. Perencanaan

Sadker, M., dan Sadker (2013), mendefinisikan perencanaan kelas berbasis gender sebagai upaya untuk menciptakan ruang kelas yang tidak hanya adil tetapi juga memberdayakan semua peserta didik dengan menekankan pentingnya strategi pengajaran yang mengakomodasi perbedaan dalam cara belajar berdasarkan gender. Perencanaan kelas berbasis gender melibatkan analisis kritis terhadap praktik pengajaran dan kebijakan pendidikan yang ada, serta pengembangan metode yang dapat menanggulangi bias gender dalam pendidikan (Acker, 2006). Jadi perencanaan kelas berbasis gender adalah seperangkat kegiatan merencanakan dengan mempertimbangkan semua aspek pengelolaan kelas berbasis gender.

Ada beberapa tahapan perencanaan kelas berbasis gender yang perlu dilakukan kepala madrasah, ada sembilan tahapan diantaranya Analisis kebutuhan, pembuatan dan pengembangan kebijakan, merancang standar kelas, pelatihan guru, pengembangan kurikulum, implementasi strategi pengajaran, penguatan komunitas, evaluasi dan refleksi.

a. Analisis Kebutuhan

Kepala madrasah perlu melakukan analisis mendalam dan mengumpulkan data tentang kinerja akademis, partisipasi, dan persepsi peserta didik terhadap

lingkungan belajar dengan mempertimbangkan perspektif gender (B. Thorne, 1993). Menganalisis berapa kelas yang akan dibentuk dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik dan dimana saja ditempatkan.

Hasil wawancara dengan kepala MAS Darul Ulum Banda Aceh mengakui ada melakukan analisis kebutuhan pengelolaan kelas berbasis gender. Analisis dilakukan tidak menggunakan instrumen tertentu. Analisis yang dilakukan terkait dengan berapa kelas yang akan dibentuk dengan mempertimbangkan data jumlah peserta didik dan dimana saja ditempatkan sehingga tidak terjadi percampuran. Analisis kebutuhan belum dilaksanakan dengan baik (Mustika, et all,. 2024).

b. Pembuatan dan Pengembangan Kebijakan

Kepala madrasah perlu membuat dan melakukan perencanaan pembuatan dan pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan kelas berbasis gender. Perencanaan diawali dengan menginventarisasi apa saja kebijakan yang perlu diambil kepala madrasah, siapa yang membuat, kapan dilakukan, merencanakan pembuatan aturan kelas, dan merencanakan penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam semua aspek pendidikan (C. Skelton, 2001 dan N. Rachmawati, 2020).

Hasil wawancara dengan kepala madrasah dan guru didapatkan bahwa madrasah telah melakukan perencanaan pembuatan dan pengembangan kebijakan campuran gender meliputi menginventarisasi apa saja kebijakan yang perlu diambil kepala madrasah, siapa yang membuat, kapan dilakukan, dan merencanakan pembuatan aturan kelas. Namun belum membuat perencanaan dan pengembangan kebijakan terkait pengelolaan kelas berbasis gender. Akan tetapi perencanaan pengembangan kebijakan belum tertulis secara administrative dengan baik.

Pihak madrasah ketika menemukan masalah, langsung mengambil kebijakan dengan berkoordinasi dengan pihak yayasan atau guru. Lalu

mengimplementasikannya. Kebijakan implementasi pembagian kelas berbasis gender dilakukan atas instruksi yayasan. Alasannya, karena madrasah berbasis pesantren (dayah) dan menjaga norma agama. Tidak boleh bercampur laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini dimulai sejak tahun 2014. Semua indikator berbasis gender di atas belum dilaksanakan.

c. Merancang Standar Kelas

Merancang standar kelas berbasis gender di madrasah sangat diperlukan. Beberapa hal yang dapat dilakukan yakni menetapkan standar penampilan kelas. Menyediakan alat ukur standar penampilan kelas. Membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan di kelas. Mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan kelas.

Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa pihak madrasah belum merancang standar kelas berbasis gender. Standar kelas dibuat melalui gambar desain bangunan madrasah. Baik menyangkut tata letak, luas bangunan, tinggi bangunan, lantai dan ventilasi. Madrasah belum menetapkan standar penampilan kelas, standar isi ruangan kelas dan alat ukur standar penampilan kelas secara tertulis. Keempat indikator perancangan standar kelas berbasis gender, belum dilakukan di madrasah ini.

d. Pelatihan Guru

Dalam pengelolaan kelas berbasis gender, kepala madrasah juga harus merencanakan penyelenggaraan pelatihan guru secara khusus dan bagaimana menerapkannya dalam pengajaran sehari-hari (Sadker, M., dan Sadker, 2013). Merencanakan kegiatan pelatihan penting, agar guru memiliki kompetensi dalam pembelajaran berbasis gender.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa pihak madrasah secara

khusus belum membuat perencanaan pelatihan pengelolaan kelas berbasis gender bagi guru. Pelatihan guru sering dilakukan di madrasah ini atau di tempat lain. Namun terkait pentingnya pengelolaan pendidikan berbasis gender secara khusus dan bagaimana menerapkannya dalam pengajaran sehari-hari di kelas belum dilaksanakan.

e. Pengembangan Kurikulum

Langkah perencaan kelas berbasis gender yang perlu dilakukan kepala madrasah berikutnya adalah perencanaan pengembangan kurikulum. Perencaan pengembangan kurikulum berbasis gender meliputi perencanaan pengembangan kurikulum yang inklusif, pemilihan materi pembelajaran, metode pengajaran, penilaian yang adil dan inklusif, memastikan materi ajar bebas bias gender dan keterwakilan semua peserta didik (Lingard, 2009).

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum dan guru diketahui bahwa perencanaan pengembangan kurikulum berbasis gender belum dilakukan. Madrasah hanya melakukan pengembangan kurikulum yang telah disediakan pemerintah secara umum tanpa membedakan gender. Perencanaan pengembangan kurikulum khusus kelas berbasis gender di madrasah ini belum dilakukan.

f. Implementasi Strategi Pengajaran

Dalam pengelolaan kelas berbasis gender, kepala madrasah perlu merencanakan strategi pengajaran. Meliputi pengaturan guru, roster pembelajaran, penentuan waktu belajar sesuai gender, penataan ruang kelas, penempatan meja dan kursi agar nyaman sesuai gender (Acker, 2006).

Hasil wawancara dengan kepala madrasah dan wakil kepala bidang kurikulum, pihak madrasah telah melakukan perencanaan implementasi strategi

pengajaran. Diantaranya pengaturan guru, roster pembelajaran, penentuan waktu belajar sesuai gender, penataan ruang kelas, penempatan meja dan kursi agar nyaman sesuai gender. Sementara di dalam kelas diserahkan pada guru. Dalam mengajar guru berupaya menjaga kesetaraan. Semua anak diberikan kesempatan yang sama, peluang, semangat, motivasi yang sama, agar berhasil mencapai keinginannya tanpa kendala. Sesuai dengan kelebihan dan keunggulan yang dimiliki peserta didik tanpa membedakan-gender.

Demikian pula dengan sarana dan prasarana. Semua sarana prasarana kelas diberikan sama tanpa membedakan gender. Mereka mendapatkan hak yang sama. Di dalam kelas ada cctv, infocus dan lain-lain. Bedanya, sarana prasarana di kelas perempuan lebih terjaga dibandingkan kelas laki-laki.

g. Penguatan Komunitas

Hal lain yang perlu direncanakan kepala madrasah terkait pengelolaan kelas berbasis gender adalah penguatan komunitas. Penguatan komunitas yang perlu dibangun adalah dengan komite, orang tua, pakar pendidikan, kementerian dan ragam komunitas lain yang mendukung inisiatif dan implementasi pendidikan berbasis gender (V., 2008). Implementasi pengelolaan kelas berbasis gender akan sulit memperoleh hasil maksimal jika hanya dilakukan secara tunggal. Diperlukan komunitas agar terbangun jejaring yang saling mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dan wakil kepala bidang kurikulum didapat keterangan bahwa madrasah belum merencanakan melakukan penguatan secara khusus dengan ragam komunitas terkait pengelolaan kelas berbasis gender. Perencanaan selama ini hanya terkait dengan penguatan komunitas secara umum, seperti komite, orang tua peserta didik, pakar pendidikan, kementerian dan *stakeholder* terkait. Pihak orang tua, sangat mendukung pemisahan

kelas berbasis gender. Dapat dipahami bahwa kepala madrasah telah melakukan penguatan komunitas dengan pihak lain kendati tidak melakukannya secara khusus.

h. Evaluasi dan Refleksi

Agar pelaksanaan evaluasi dan refleksi memperoleh hasil yang maksimal, kepala madrasah perlu merencanakan lebih awal. Perencanaan evaluasi dan refleksi dilakukan dengan menyiapkan instrumen sesuai tahapan pengelolaannya agar hasilnya valid. Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap kebijakan dan praktik yang telah diterapkan dan selanjutnya melakukan umpan balik (J. Ruddock, 2007).

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum dan guru diperoleh data bahwa madrasah belum membuat perencanaan evaluasi dan refleksi pengelolaan kelas berbasis gender. Pihak madrasah hanya melakukan evaluasi dan refleksi secara insidental, tanpa merencanakannya terlebih dahulu. Setiap persoalan yang muncul, dievaluasi secara langsung dan direfleksi. Data tersebut menunjukkan bahwa, kepala madrasah belum melakukan perencanaan evaluasi dan refleksi pengelolaan kelas berbasis gender dengan baik. Dari 9 tahapan perencanaan hanya 3 tahapan yang sudah cukup baik dilaksanakan diantaranya standar kelas, pelatihan guru, , implementasi strategi pengajaran, penguatan komunitas.

2. Pelaksanaan

Keddie (2020) pengorganisasian kelas berbasis gender sebagai strategi untuk mengatur ruang dan interaksi di kelas yang secara aktif mempertimbangkan perbedaan gender, dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung partisipasi semua peserta didik. Baker (2022), menyatakan bahwa pengorganisasian kelas berbasis gender adalah pengelolaan kelas dengan memperhatikan dinamika kelompok, interaksi sosial antara gender dan

meminimalkan stereotip gender dalam pembelajaran.

Dalam pengelolaan kelas berbasis gender, kepala madrasah harus melakukan pengorganisasian kelas. Pengorganisasian kelas berbasis gender oleh kepala madrasah merupakan serangkaian kegiatan mengelompokkan peserta didik sesuai gender dalam kelas-kelas tertentu sesuai jumlah peserta didik dan jumlah kelas yang dikehendaki dengan memperhatikan berbagai aspek kegenderan.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan kepala madrasah terkait pengorganisasian kelas berbasis gender (Hidayati, N., 2023; Prabowo, 2021; Widyastuti, 2022) berikut ini:

- a. Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan;
- b. Penempatan kelas peserta didik sesuai gender;
- c. Pengaturan kelas peserta didik meliputi layout ruang kelas yang memfasilitasi interaksi antar peserta didik, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, penataan tempat duduk dan aksesibilitas alat bantu pembelajaran;
- d. Penentuan jumlah peserta didik tiap kelas sesuai gender;
- e. Penempatan peserta didik menurut kecerdasan, berupa kelas unggul dan sejenisnya;
- f. Penempatan peserta didik menurut bakat dan minat diantaranya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
- g. Penempatan peserta didik menurut gaya belajar;
- h. Pengelolaan waktu belajar melalui roster belajar termasuk alokasi waktu untuk diskusi, kerja kelompok, dan aktivitas individu;
- i. Pengelompokan didasarkan strategi pembelajaran seperti pembelajaran kolaboratif, berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah.
- j. Merancang dan mengembangkan kelompok belajar yang berisi peserta didik dengan kemampuan bervariasi.

k. Pendelegasian wewenang pengelolaan kelas kepada peserta didik.

Dalam proses pengorganisasian kelas berbasis gender, kepala madrasah perlu melibatkan guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Misalnya saja dalam pemilihan ketua kelas, penataan ruang agar kelihatan apik, dan pengambilan keputusan bersama. Langkah ini membantu menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan kepala, wakil kepala madrasah dan guru diperoleh data bahwa kepala madrasah telah melakukan pengorganisasian kelas berbasis gender di MAS Darul Ulum Banda Aceh. Beberapa kegiatan pengorganisasian yang dilaksanakan yakni a) Penentuan sumber daya sesuai kompetensinya. b) Penempatan kelas peserta didik sesuai gender. c) Pengaturan kelas berupa penataan tempat duduk dan aksesibilitas alat bantu pembelajaran. d) Penentuan jumlah peserta didik tiap kelas sesuai gender. e) Penempatan peserta didik menurut kecerdasan, berupa kelas unggul dan sejenisnya.

Selain itu, hal lain yang dilakukan dalam pengorganisasian adalah f) Penempatan peserta didik sesuai bakat dan minat baik dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. g) Pengelolaan waktu belajar melalui roster belajar. h) Pengelompokan didasarkan pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. i) Merancang dan mengembangkan kelompok belajar dengan kemampuan bervariasi dan j) Pendelegasian wewenang pengelolaan kelas kepada peserta didik. Dari 11 kegiatan pengorganisasian, hanya 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan, sehingga dapat disimpulkan kegiatan pengorganisasian, kelas berbasis gender atau bukan, tidak memiliki perbedaan signifikan.

Pelaksanaan manajemen kelas berbasis gender mencakup penerapan kebijakan dan praktik yang mendukung interaksi positif antara peserta didik laki-laki

dan perempuan, serta menciptakan lingkungan yang aman untuk semua peserta didik (Murray, 2021). Pelaksanaan pengelolaan kelas berbasis gender oleh kepala madrasah adalah usaha menggerakkan semua *stakeholder* terkait yang ada di madrasah untuk mengimplementasikan semua aspek yang telah direncanakan agar mencapai tujuan organisasi secara optimal. Pelaksanaan mencakup di dalamnya, yaitu kepemimpinan kepala madrasah, motivasi, komunikasi, konsistensi implementasi, keterlibatan semua pihak, dan bentuk-bentuk lain dalam rangka mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan organisasi.

3. Pengawasan

Monitoring atau pengawasan dalam manajemen kelas berbasis gender adalah proses sistematis yang dilakukan kepala madrasah untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya adil, tetapi juga memperhatikan perbedaan gender dalam interaksi dan pembelajaran (Lailatussaadah et al., 2020; Prihastuti, R., 2022; Rahmawati, 2021), menjelaskan pengawasan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang setara, di mana semua peserta didik, tanpa memandang gender, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang.

Kepala madrasah perlu melakukan *monev* pada setiap tahapan pengelolaan kelas dan dilakukan secara kontinyu agar terlaksana keberlanjutan program. Kepala madrasah perlu memastikan bahwa setiap langkah yang ditempuh berbagai *stakeholder* didasarkan pada keadilan gender dan tidak bias gender.

Ada beberapa tahapan *monev* yang dilakukan kepala madrasah agar pengelolaan kelas berbasis gender dapat terlaksana dengan optimal:

- a. Mengidentifikasi masalah (Rahmawati, 2021). Kepala madrasah perlu mengidentifikasi apa saja isu-isu dan masalah pengelolaan kelas berbasis gender yang perlu diawasi, lalu memverifikasi dan menyusun skala prioritas;

- b. Menyusun perencanaan monev meliputi aspek yang harus di monev, siapa saja yang melakukan, waktu dan penganggarnya;
- c. Menyusun dan menyiapkan instrumen monev;
- d. Melakukan monev;
- e. Melakukan analisis hasil monev;
- f. Membuat laporan hasil monev dan
- g. Melakukan tindak lanjut.

Dari hasil observasi, wawancara dan telaah dokumentasi pada MAS Darul Ulum Banda Aceh diperoleh informasi bahwa tahapan monev yang telah dilakukan dengan menggunakan instrumen tanpa membedakan gender adalah mengidentifikasi masalah, memverifikasi dan menyusun skala prioritas. Lalu merencanakan monev meliputi aspek yang harus dimonev, siapa saja yang melakukan monev, waktu dan penganggarnya. Menyusun dan menyiapkan instrumen monev, melakukan monev, melakukan analisis hasil monev, membuat laporan hasil monev dan melakukan tindak lanjut.

Dari data di atas terlihat bahwa pengawasan kelas berbasis gender secara khusus belum dilakukan. Kepala madrasah hanya menggunakan intuisi jika ada masalah pengelolaan kelas berbasis gender yang mendesak. Madrasah menyiapkan jadwal monev yang berisi aspek yang harus dimonev, siapa saja yang melakukan dan waktunya.

Umpan balik dalam manajemen kelas berbasis gender adalah respon yang diberikan ragam stakeholder terhadap berbagai kebijakan atau kegiatan pengelolaan kelas dengan mempertimbangkan perspektif gender yang diimplementasikan, untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan semua peserta didik (Rahman, 2021). Umpan balik merupakan strategi komunikasi

yang mempertimbangkan perbedaan gender dalam penerimaan informasi, yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik (Utami, 2023). Umpan balik harus diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif dari semua gender (Susanti, 2022).

Pengelolaan kelas berbasis gender dapat dilaksanakan secara maksimal, kepala madrasah perlu melakukan umpan balik. Umpan balik adalah respon stakeholder terhadap berbagai kebijakan atau kegiatan kepala madrasah dalam pengelolaan kelas dengan mempertimbangkan perspektif gender. Dengan umpan balik, kepala madrasah dapat memastikan bahwa terjadi perbaikan pengelolaan kelas berbasis gender secara berkelanjutan tanpa henti.

Melalui monev, kepala madrasah dapat menghimpun berbagai informasi yang diperlukan terkait implementasi pengelolaan kelas berbasis gender. Baik terkait keberhasilan maupun kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan perlu dilakukan umpan balik agar secara bertahap pengelolaan kelas berbasis gender terus semakin optimal. Mengimplementasikan perubahan berdasarkan umpan balik dan evaluasi dapat meningkatkan pengelolaan kelas berbasis gender (Turner, D., 2021).

Secara garis besar, ada dua aspek yang perlu dilakukan umpan balik oleh kepala madrasah. Kedua aspek itu adalah aspek manajerial kepala madrasah dan substansi pengelolaan kelas berbasis gender oleh guru di kelas. Aspek yang terkait manajerial kepala madrasah adalah seluruh tahapan pengelolaan kelas berbasis gender. Sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monev dan sampai pelaporan. Segala aktivitas apapun yang dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan kelas harus dilakukan umpan balik.

Pelaporan adalah proses penyampaian informasi tentang perkembangan pengelolaan kelas berbasis gender kepada pihak terkait (Aisyah Rahman, 2021). Pelaporan mencakup penyampaian data yang relevan tentang pengelolaan kelas

berbasis gender oleh kepala madrasah dan guru yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias gender dalam pembelajaran (Susanti, 2022). Penyampaian data dan informasi dilakukan secara sistematis agar mudah dipahami sehingga dapat dilakukan umpan balik (Smith, 2020).

Dalam pengelolaan kelas berbasis gender, kepala madrasah harus meminta laporan kepada pihak terkait di madrasah agar memudahkan dalam melakukan umpan balik dan pengambilan kebijakan. Pelaporan dapat dibuat secara kolektif oleh wakil kepala bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta humas. Laporan disampaikan kepada kepala madrasah dan selanjutnya diteruskan pada stakeholder yang berkepentingan.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016, penyusunan laporan terdiri dari:

- a. Kulit laporan, memuat judul, nama lembaga yang melaporkan dan tahun pembuatan laporan;
- b. Pendahuluan berisi:
 - 1) Umum, berisi gambaran umum kegiatan;
 - 2) Maksud dan Tujuan, berisi apa saja yang menjadi maksud dan tujuan kegiatan;
 - 3) Ruang Lingkup, batasan kegiatan yang dilaksanakan;
 - 4) Dasar, yakni dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Kegiatan yang Dilaksanakan, menjelaskan apa saja kegiatan yang dilaksanakan terkait pengelolaan kelas berbasis gender;
- d. Hasil yang Dicapai, berisi tentang hasil-hasil yang diperoleh dilengkapi data;
- e. Simpulan dan Saran, berisi apa saja kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran agar dilakukan perbaikan.
- f. Lampiran, dapat berupa data, foto, surat dan sebagainya (Kementerian Agama RI,

2016).

Conclusion

Pengelolaan kelas berbasis gender di MAS Darul Ulum Banda Aceh belum maksimal dilaksanakan. Pada tahapan perencanaan hanya 3 tahapan yang sudah dilaksanakan dari 9 tahapan, selebihnya belum melaksanakan sesuai tahapan perencanaan. Hal tersebut mempengaruhi rangkaian pelaksanaan kelas berbasis gender. Dinyatakan sudah cukup baik dikarenakan rangkaian pelaksanaan yang dijalankan masih sedikit. Pada tahapan pengawasan belum dilaksanakan dengan baik. Sehingga, semakin terprogram kebijakan pengelolaan kelas berbasis gender, semakin baik pula pengelolannya. Penelitian ini hanya mendeskripsikan 3 fungsi pengelolaan kelas berbasis gender. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti indikator yang sama, akan tetapi menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk melihat persentase keterlaksanaan pengelolaan kelas berbasis gender.

References

- Acker, S. (2006). *Gender and Education: An International Perspective*. Routledge.
- Amiruddin, et al. (2022). *Pengantar Manajemen (Konsep dan Pendekatan Teoretis)*. CV. Media Sains Indonesia.
- Arifah, I. (2019). Upaya Pola Pengelolaan Kelas berbasis Gender dalam Meningkatkan Prestasi Hafalan Al-Quran (Studi Kasus Kelas VIII SMP IT Ar-Rahmah Bogor). *Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1-15.
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Remaja Roesdakarya.
- Baker, D. (2022). Revisiting Gender Equity in the Classroom. *Educational Studies*, 233-245.
- Choiri, A. (2018). *Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak dalam Kasus Perceraian*. Mahkamah Agung RI.
- Gurian, M. (2005). *The Minds of Boys: Saving Our Sons from Falling Behind in School and Life*. Jossey-Bass.
- Hidayati, N. (2023). Desain Ruang Kelas yang Inklusif. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 12-

18.

- Keddie, A. (2020). *Gender in Education: A Critical Perspective*,. Routledge.
- Lailatussaadah, Fitriyawany, Erfiati, & Mutia, S. (2020). Faktor-faktor Penunjang dan Penghambat Pelaksanaan Pembelajaran Daring (Online) PPG dalam Jabatan (Daljab) Pada Guru Perempuan di Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(2), 41–50.
- Lingard, B. (2009). *Gender, Education and the Future*. Routledge.
- McKeon, B. E. (2010). *Learning in a Gendered Classroom: The Importance of Classroom Context*. Routledge.
- Murray, C. (2021). *Gender-Sensitive Pedagogy in Practice*. Palgrave Macmillan.
- Nguyen, P., & Le, T. (2021). *Monitoring Gender Equality in the Classroom*. Education Policy Analysis Archives.
- Nugraha, M. (2018). Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 4(6).
- Nurmayuli, N., Lailatussaadah, L., & Mustika, C. R. (2024). Analisis Pemetaan Penempatan Guru Sekolah Dasar Se-Kota Lhokseumawe. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 313–326.
- Nurmayuli, N., & Oktarina, R. (2023). Strategi Guru dalam Penilaian Prestasi Belajar Peserta Didik di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Aceh Jaya. *Pase: Journal of Contemporary Islamic Education*, 2(1), 47–60.
<https://doi.org/10.47766/PASE.V2I1.1789>
- Oviyanti, F. (2009). *Pengelolaan Pengajaran*. Rafa Press.
- Prabowo, D. (2021). Manajemen Waktu dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dan Manajemen*, 85–90.
- Priansya, E. K. dan. (2014). *Manajemen Kelas* (Bandung (ed.)). Alfabeta.
- Prihastuti, R., A. (2022). *Kebijakan Pendidikan Berbasis Gender*. Alfabeta.
- Rahman, A. (2021). *Manajemen Kelas Berbasis Gender: Teori dan Praktik*. Universitas Indonesia.
- Rahmawati, T. (2021). *Pengaruh Gender dalam Pendidikan*. Universitas Indonesia.
- Rogers, K., & Allen, M. (2020). Feedback Loops in Gender-Inclusive Classrooms. *San Francisco: Journal of Curriculum Studies*.
- Rohmatullah, Z. A. dan A. (2023). Manajemen Kelas Berbasis Pemisahan Gender dan Relasinya dengan Prestasi Siswa (Studi Kasus di MTs Darullughah Wadda'wah Pasuruan). *Al-Idaroh*, 7(9).
- Sadker, M., dan Sadker, D. (2013). *Gender and Education: The Future of Girls' and Boys' Education*. McGraw-Hill Inc.
- Sax, L. (2005). *Why Gender Matters: What Parents and Teachers Need to Know About the Emerging Science of Sex Differences*. Doubleday.
- Smith, D. P. (2020). *Gender and Classroom Management: A Global Perspective*.

Routledge.

- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono*. Alfabeta.
- Susanti, L. (2022). *Gender dalam Pendidikan: Membangun Kesetaraan di Kelas*. Alfabeta.
- Syaifurahman. (2013). *Manajemen dalam Pembelajaran*. PT Indeks.
- Turner, D., L. (2021). *Continuous Improvement in Education*. Springer.
- Utami, M. (2023). *Pendidikan Inklusif: Strategi Manajemen Kelas Berbasis Gender*.
Laksana.
- V., M. (2008). *Social Capital and Children's Well-Being*. Palgrave Macmillan.
- Widyastuti, R. (2022). Metode Pembelajaran Responsif terhadap Kebutuhan Siswa.
Jurnal Pendidikan, 95–100.
- Yin, R. (2003). *Case Study Research Design and Method*. Sage Publications.
- Zulaiha, S. (2017). Urgensi Kurikulum dan Sistem Pembelajaran Inklusif Gender.
Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, 4(2), 86–106.